

TANGGUNG GUGAT NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBATALKAN

Nama : Vara Deviana

Jurusan/Program Studi: Fakultas Hukum/ Magister Kenotariatan

Pembimbing : Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak. Kenyataannya notaris digugat atas akta yang dibuatnya. Permasalahan: Apakah Notaris bertanggung gugat atas pembuatan Akta Risalah RUPS-LB dan Apa akibat hukum dibatalkannya Akta RUPS-LB. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian disimpulkan: Penerapan tanggung gugat dalam pembuatan akta risalah RUPS-LB yang dapat dilakukan notaris adalah dengan mengikuti prosedur rapat yang telah ditentukan dalam UUPT dan mematuhi kewajiban dan larangan dalam UUJN dan kode etik Notaris agar akta dikatakan akta autentik. Dalam Putusan No.312/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Sel. Notaris tidak menerapkan tanggung gugat dalam pembuatan akta Risalah RUPS-LB karena diselenggarakan bertentangan dengan ketentuan pasal 35 ayat (3) jo pasal 77 ayat (4) UUPT, akta risalah RUPS-LB menjadi cacat hukum. Notaris bertanggung gugat atas kebenaran lahiriah, formil dan materiil akta, harus dipenuhi dari segi kewenangan formil maupun substansi akta. Apabila akta risalah RUPS-LB tidak dibuat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka mengakibatkan akta kehilangan otensitas atau batalnya akta. Notaris yang membuat akta risalah RUPS-LB dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menggugat ganti rugi kepada Notaris.

Kata Kunci: Notaris, RUPS-LB, Dibatalkan

ACCOUNT OF THE NOTARY WHO MADE THE DEED OF THE MINUTES OF THE CANCELED GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Name: Vara Deviana

Department/Study Program: Faculty Of Law/ Master Of Notary

Contributor : Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn

ABSTRACT

In carrying out his office, a notary is obliged to act in a trustworthy, honest, thorough, independent and impartial manner. In fact, the notary was sued for the deed he made. Issue: Is the Notary responsible for the preparation of the RUPS-LB Minutes Deed and what are the legal consequences of canceling the RUPS-LB Deed. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the research concluded: The application of accountability in making the EGMS minutes deed which can be carried out by a notary is by following the meeting procedures specified in the UUPT and complying with the obligations and prohibitions in the UUJN and the Notary's code of ethics so that the deed can be said to be an authentic deed. In Decision No.312/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Sel. The notary does not apply accountability in making the deed of minutes of the EGMS because it is held contrary to the provisions of article 35 paragraph (3) in conjunction with article 77 paragraph (4) of the Company Law, the deed of minutes of the EGMS is legally flawed. The notary is responsible for the external, formal and material truth of the deed, which must be fulfilled in terms of formal authority and the substance of the deed. If the deed of minutes of the EGMS is not drawn up as determined by statutory regulations, it will result in the deed losing its authenticity or the deed being invalidated. A notary who makes a deed of minutes of the EGMS without applying the precautionary principle gives the injured party the right to sue the Notary for compensation.

Keywords: *Notary, EGMS, Canceled*